

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara dapat dilihat dari peningkatan kualitas perekonomian masyarakat. Semakin tinggi tingkat kualitas ekonomi maka semakin tinggi pula daya saing ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakat sendiri bergantung pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pertama peran dari pemerintah melalui sebuah kebijakan dan regulasi kepada pelaku usaha. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar memberikan semangat kepada pelaku usaha dalam persaingan usaha global. Kedua, terletak dalam peran aktif masyarakat sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha menjadi penting karena upaya peningkatan perekonomian yang dilakukan pelaku usaha menjadi perputaran roda ekonomi dan pelaku usaha juga yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Kehidupan usaha yang semakin rumit dan kompleks sehingga tercipta banyak jenis usaha dan jenis kerjasama yang beragam. Berbagai jenis usaha dan jenis kerjasama ini yang akan melahirkan berbagai macam bentuk resiko. Kemungkinan adanya tingkat resiko dalam pelaku usaha tidak bisa dihindari. Pelaku usaha dalam hal ini dapat mengalihkan resiko kepada pihak lain, sehingga memunculkan usaha pengalihan.

Dunia perbankan atau lembaga pembiayaan mulai banyak melirik sektor pengalihan resiko yaitu melalui asuransi. Perkembangan yang saat ini,

jaminan kresit yang dahulu hanya seputar jaminan kebendaan, sekarang jaminan kredit juga dapat dilakukan dengan asuransi jiwa. Pengalihan resiko pada pihak asuransi dirasa memberikan keamanan bagi pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan, karena jika debitur tidak dapat membayar maka asuransi jiwa dari pihak debitur yang menjadi pegangan bagi pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan, bahwa kreditur tersebut masih mempunyai kekayaan yang dapat dimintakan atau dilakukan pelunasan. Asuransi jiwa yang memiliki nilai inilah yang menjadi perhitungan bagi pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Jaminan kebendaan yang selama ini menjadi jaminan dalam kredit tidak lagi memberikan rasa aman bagi kreditur. Kondisi-kondisi yang tidak dapat diduga dapat terjadi pada benda yang dijadikan jaminan kebendaan. Seperti contoh jika menjaminkan sebuah rumah, dan rumah rumah tersebut terkena bencana alam maka nilai rumah tersebut menjadi turun, hal ini tentu merugikan bagi kreditur maupun debitur. Hal lain yang bisa saja terjadi adalah hilangnya penghasilan debitur atau meninggalnya debitur. Tentu menjadi kerugian bagi pihak kreditur. Hal inilah yang akhirnya membuat lembaga pembiayaan atau kreditur menerima jaminan asuransi jiwa yang telah memiliki nilai.

Usaha peransuransian telah berjalan cukup lama di Indonesia, serta berperan dalam perekonomian Indonesia dan sektor kegiatan ekonomi

lainnya.¹ Usaha peransuransian diharapkan dapat semakin meningkatkan lagi pergerakan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Asuransi merupakan usaha di bidang keuangan yang bergerak terkait pertanggungan resiko. Asuransi sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi pengusaha. Fungsi asuransi sebagai perlindungan terhadap terjadinya peristiwa yang tak terduga.

Saat ini perusahaan asuransi di Indonesia telah mengalami banyak peningkatan secara pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah perusahaan asuransi. Hingga akhir tahun 2018 jumlah perusahaan asuransi sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan asuransi menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Saat ini perusahaan asuransi juga memberikan fasilitas jaminan kredit, bahwa perusahaan asuransi memberikan jaminan kepada kreditur jika debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur karena meninggalnya debitur. Salah satunya adalah perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Didirikan 107 tahun lalu menjadi bukti bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia sebagai pelayanan terhadap masyarakat. AJB Bumiputera berkembang dalam sejarahnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan produk yang beragam, serta teknologi mutakhir.

¹ A. Junaidi Gani. 2013. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 9.

Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, dengan nama “Onderlingen levensverzekering Maatschappij persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda”. Awalnya hanya melayani para guru sekolah hindia belanda namun akhirnya memperluas jaringannya kepada masyarakat umum. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, menjadikannya perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. Berlandaskan tiga pilar yaitu profesionalisme, mutualisme, dan idealisme.²

Perusahaan asuransi seperti AJB Bumiputera 1912 yang saat ini juga menjangkau terkait jaminan polis sebagai jaminan hutang antara kreditur dan debitur. Pada umumnya selama ini yang menjadi objek jaminan merupakan benda atau seseorang. Jaminan benda bergerak seperti kendaraan dan mesin-mesin maupun benda tidak bergerak seperti aset tanah dan/ bangunan. Jaminan perseorangan bahwa seseorang menjaminkan dirinya termasuk seluruh kekayaannya sebagai jaminan pelunasan hutang seseorang.

Kreditur meskipun terdapat jaminan, terkadang juga memberikan antisipasi keadaan jika debitur tidak dapat membayar hutangnya. Terkait hal ini kreditur mewajibkan debitur untuk menjadi peserta asuransi jiwa, bahwa pihak debitur sebagai pemegang polis dan pihak kreditur sebagai penerima manfaat.

² Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham

Berdasarkan definisi usaha asuransi jiwa³ dan ruang lingkup kegiatan usaha asuransi jiwa⁴ yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut “UU Perasuransian”), ditetapkan kewenangan dari perusahaan asuransi jiwa yaitu, perusahaan asuransi jiwa dibatasi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha kesehatan, dan lini usaha kecelakaan diri. Bila ditarik benang merah antara ketentuan yang diatur di dalam UU Perasuransian dengan praktik yang terjadi, maka secara kasat mata praktik penjaminan polis asuransi jiwa terlihat menyimpang dari rumusan yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat berakibat batalnya demi hukum kesepakatan-kesepakatan yang mengikutinya. Namun hal ini memerlukan analisis lebih mendalam dan bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Pertimbangan seperti apa yang menjadi dasar dari kreditur atau perbankan atau lembaga pembiayaan sehingga menggunakan asuransi jiwa sebagai jaminan pemberian kredit menjadi salah satu fokus penelitian penulis.

Selanjutnya yang menjadi perhatian penulis adalah terkait bentuk perlindungan yang didapatkan oleh debitur jika kreditur meninggal dunia atau tidak dapat melunasi hutangnya. Dalam penelitian ini penulis fokus pada AJB

³ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian, “Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

⁴ Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Perasuransian, “Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha kesehatan, dan lini usaha kecelakaan diri.”

Bumiputera selaku perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Indonesia, untuk mengkaji jaminan polis asuransi AJB Bumiputera yang dijadikan jaminan bagi kreditur serta bentuk perlindungan kepada debitur.

Melihat uraian dan permasalahan tersebut di atas penulis ingin membahas lebih dalam terkait dasar hukum asuransi AJB Bumiputera 1912 dapat menjadi jaminan kreditur dan debitur serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 dalam memberikan perlindungan kepada kreditur jika debitur meninggal atau tidak dapat memnuhi hutangnya , oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa Jika Debitur Meninggal (Studi Pada PT. AJB Bumiputera 1921 Cabang Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan kredit debitur di PT. AJB Bumiputera 1912?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan asuransi jiwa PT AJB Bumiputera 1912 jika debitur meninggal ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan kredit debitur di PT. AJB Bumiputera 1912.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan asuransi jiwa PT AJB Bumiputera 1912 jika debitur meninggal.

D. Manfaat Penulisan

Atas dasar latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana penulis uraikan diatas maka penulis berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam hukum perdata di Indonesia khususnya hukum asuransi, jaminan dan perbankan. Serta, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan pengetahuan hukum asuransi, jaminan perbankan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya

menyangkut hukum perdata terkait hukum asuransi dan jaminan perbankan.

b. Bagi Lembaga Asuransi

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, dan kontribusi bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam peraturan perundang-undangan dan terkait penerapan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur di Indonesia.

c. Bagi masyarakat

- 1) Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat luas tentang polis asuransi tidak hanya sebuah proteksi tetapi juga bisa merupakan jaminan.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam polis asuransi yang dapat dijadikan jaminan bagi kreditur.

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis⁵. Metode penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti atau kondisi nyata dan penelitian ini mengarah pada bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian

⁵ Rony hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Halaman 34.

ini fokus meneliti orang dalam kaitan hubungan hidup di masyarakat dan hukum. Metode penelitian hukum empiris ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan demikian karena penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

E.2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Analitis yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat rnelukiskan kenyataan atau realitas yang kornpleks tentang kedudukan hukum, polis asuransi yang dijadikan objek jaminan dan perlindungan hukum kepada kreditur oleh asuransi AJB Bumiputera 1912.

Penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan secara lengkap dan sistematis atas suatu fenomena hukum. Bahwa uraian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu.⁷

E.3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

⁶ Soejono Soekamto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres. Halaman 10

⁷ Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 50.

Data Primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni didapatkan langsung melalui interview atau wawancara serta pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan dapat diperoleh dari penelitian yang berupa bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian yakni

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah atau sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di AJB Bumiputera dengan fokus penelitian pada AJB Bumiputera Cabang Batu. Jalan Panglima Sudirman Nomor 60a Kota Batu.

E.5. Penentuan Responden

Responden yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Prambudy H.W. S.Sos selaku pimpinan PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Batu guna mempermudah mendapatkan informasi yang otentik dan faktual dalam penelitian ini. Pegawai kantor AJB Bumiputera 1912 yang mengetahui terkait prosedur dan hal-hal yang terkait produk asuransi sebagai jaminan kredit dalam perbankan.

E.6. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

- a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara.
- b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara atau interview, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dan kompeten terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu teknik yang digunakan dalam melengkapi penelitian ini yakni teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan bersifat normatif dari berbagai peraturan perundang-undangan serta

berbagai macam literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

E.7. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik data hukum primer, maupun data sekunder yang merupakan hasil dari wawancara dan studi kepustakaan yang terkait. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif. Kemudian mengkualifikasikannya dan mengumpulkan data kerangka penulisan skripsi secara menyeluruh. Selanjutnya data yang dikualifikasikan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan dan permasalahan yang dibahas.

Mengelolah dan menganalisis suatu data yang diperoleh dalam penelitian akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini yaitu analisis yang tidak mementingkan banyaknya data yang diperoleh atau kuantitatif tetapi cenderung bagaimana kualitas data yang diperoleh dan dilakukan pendataaan yang disusun secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atas suatu keadaan yang diteliti.

Selain itu juga melakukan metode induktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju yang bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang

suatu masalah atau suatu keadaan yang diteliti dan biasanya metode ini juga dapat disebut dengan metode piramida terbalik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut⁸

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain asuransi, perusahaan asuransi, jaminan, kredit, dan perlindungan hukum

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta berisikan pembahasan dan tinjauan umum tentang AJB Bumiputera 1912. Hal ini meliputi tentang profil AJB Bumiputera Malang, Serta

⁸ 2012. *Pedoman Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 22-24.

kedudukan hukum polis asuransi sebagai jaminan dalam hukum di Indonesia dan perlindungan hukumnya terhadap kreditur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.

